PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANTE SAKSONO HARBUWONO**
2. Jabatan : **WAKIL MENTERI**
3. NHK : **788417**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 74.080.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.080.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/475 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 8.841.000.000

1. MOBIL, MINI COOPER SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. MOBIL, JEEP WRANGLER JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. MOBIL, MERCEDEZ BENZ SEDAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
5. MOTOR, HARLEY DAVIDSON MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

6. MOBIL, BMW I-7 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000
7. MOBIL, MINI COOPER JCW Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 1.291.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**44.487.824.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**4.533.480.651**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**14.408.913.108**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**146.351.217.759**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**4.024.038.510**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**142.327.179.249**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.